




PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/21
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum. NIP. 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : - - -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
 JL. Jaksa Agung Suripto no.18Telp./Fax.(0338) 672323
 SITUBONDO- (68312)

Nomor SOP	: SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Situbondo

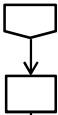

SOP Layanan Pemeriksaan Setempat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 2 Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) HIR, Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Instrumen Penaksiran Panjar Biaya Pemeriksaan setempat; 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara; 6 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan; 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 8 SK Dirjen Nomor 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara 9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/186/HK.OO.8/SK/I /2018 tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat; 10 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5 11 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perlengkapan Komputer, Alat Ukur, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/18/01 dan FM/AP/21/01

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan standar komponen biaya pemeriksaan setempat	○					Buku II	30 Menit	SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
2	Memeriksa permohonan Pemeriksaan Setempat atas permintaan Pihak atau kepentingan Majelis		↓				Obyek Pemeriksaan Setempat	10 menit	Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat
3	Memerintahkan untuk menambah panjar biaya perkara		↓				Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	5 menit	Instrumen perintah tambah panjar (FM/AP/18/01)
4	Menaksir biaya pemeriksaan setempat				↓		SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat	5 menit	Rincian biaya
5	Menerima pelunasan pembayaran tambah panjar				↓		Instrumen perintah tambah panjar, Rincian biaya	5 menit	Bukti Setoran Bank dan SKUM Tambah Panjar (FM/AP/21/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Desa terkait						Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	1 hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa
7	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat					Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa	1 hari	Berita acara sidang pemeriksaan setempat	